



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/500/Kpts/BPT-PS/2017**

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
PADA SEMBILAN NAGARI DI KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sembilan Nagari Di Kecamatan Silaut periode Tahun 2011 - 2017 yakni Nagari Sungai Sirah, Nagari Sungai Sarik, Nagari Sungai Pulai, Nagari Pasir Binjai, Nagari Talang Binjai, Nagari Durian Seribu, Nagari Lubuk Bunta, Nagari Air Hitam dan Nagari Sambungo telah berakhir pada tanggal 4 November 2017 perlu dilakukan penggantian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, anggota Bamus Nagari terpilih diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan;
 - c. bahwa sehubungan dengan terpilihnya keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sembilan Nagari Di Kecamatan Silaut periode Tahun 2017-2023, maka untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kedudukan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari periode Tahun 2011-2017 diberhentikan dengan hormat;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Camat Silaut Nomor: 140/113/Cs-PS/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Susunan dan kedudukan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sembilan Nagari Di Kecamatan Silaut periode Tahun 2017-2023, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b; huruf c. dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sembilan Nagari Di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengesahkan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sembilan Nagari Di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2017-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- KEDUA** : Pemberhentian dengan hormat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sembilan Nagari Di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2011-2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

KETIGA

: Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari dan berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama-sama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan bulan November 2023.

KEEMPAT

: Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sembilan Nagari Di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, serta melaksanakan dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 8 November 2017



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kab. Pessel
2. Camat Silaut
3. Bamus Nagari yang bersangkutan

AMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PESIIR SELATAN

NOMOR : 140/ 510 K/PIS/BPT-PS/2017

TANGGAL : 8 NOVEMBER 2017

**TENTANG : PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PADA SEMBILAN
NAGARI DI KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESIIR
SELATAN**

**Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sembilan Nagari Di
Kecamatan Silaut Periode Tahun 2011-2017**

NO	PEMERINTAHAN NAGARI & NAMA	JABATAN	UNSUR
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	SUNGAI SIRAH		
1	RIZALMADI, S.Pd	Ketua	Cadiak Pandai
2	ASMARIZAL ARTIS	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	ILHARMEN, S.Pd	Sekretaris	Pemuda
4	SURYADI	Anggota	Ninik Mamak
5	ETRI DAHNI	Anggota	Bundo Kanduang
II.	SUNGAI SARIK		
1	KOMARRUDIN	Ketua	Alim Ulama
2	SYAFRIAL, A.Ma	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	SUTRISNO	Sekretaris	Pemuda
4	MARJELI	Anggota	Ninik Mamak
5	DEDA YANTI, A.Ma	Anggota	Bundo Kanduang
III.	SUNGAI PULAI		
1	DISMAN, S.Pd	Ketua	Cadiak Pandai
2	MUH. TOKERI	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	BAHARUDDIN, S.Pd	Sekretaris	Ninik Mamak
4	DESRIFAYANTI, A.Ma, Pd	Anggota	Bundo Kanduang
5	SLAMET BUDIONO	Anggota	Pemuda
IV.	PASIR BINJAI		
1	LASDI, A.Ma	Ketua	Alim Ulama
2	H. NGASRIP SUBEKTI	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	DESI MERIA SANTI, S.Ps.I	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	HARYANTO	Anggota	Pemuda
5	ARMEN	Anggota	Ninik Mamak

(1)	(2)	(3)	(4)
V.	TALANG BINJAI		
1	DAHLIUSMAN	Ketua	Ninik Mamak
2	M. MUHLISIN	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	ABDUL RAHMAN	Sekretaris	Cadiak Pandai
4	NENENG TARMILAH	Anggota	Bundo Kanduang
5	MOHAMMAD ZAKARIA	Anggota	Pemuda
VI	DURIAN SERIBU		
1	SUNARDI	Ketua	Cadiak Pandai
2	KHUDLORI, A.Ma	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	MARDILENA, S.Pd,SD	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	RUDI YANTO	Anggota	Pemuda
5	GOLKAR	Anggota	Ninik Mamak
VII.	LUBUK BUNTA		
1	JIAL, S.Pd,SD	Ketua	Pemuda
2	ZAINAL ABIDIN, A.Ma	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3	TUGIMAN, S.Pd,SD	Sekretaris	Cadiak Pandai
4	SUMARNI, SE	Anggota	Bundo Kanduang
5	MATHORI	Anggota	Alim Ulama
VIII	AIR HITAM		
1	MASRIL, S.Pd	Ketua	Pemuda
2	CASMAN EDI SURYANTO, S.Pd	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	DWI MUCHRANTO	Sekretaris	Cadiak Pandai
4	IFRIZAL	Anggota	Ninik Mamak
5	DESMAYESI ASDAM	Anggota	Bundo Kanduang
IX.	SAMBUNGO		
1	MUNDAK PRIYONO	Ketua	Cadiak Pandai
2	DALIYO	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	GANI	Sekretaris	Pemuda
4	SYAFRAL	Anggota	Ninik Mamak
5	ANIS SRIWATI	Anggota	Bundo Kanduang



PIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 140/500 /KPTS/BPT-PS/2017
 TANGGAL : 8 NOVEMBER 2017
 TENTANG : PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PADA SEMBILAN
 NAGARI DI KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR
 SELATAN

Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sembilan Nagari Di
 Kecamatan Silaut Periode Tahun 2017-2023

NO	PEMERINTAHAN NAGARI & NAMA	JABATAN	UNSUR
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	SUNGAI SIRAH		
1	ARIL	Ketua	Ninik Mamak
2	SURYADI	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	ASMARIZAL ARTIS	Sekretaris	Alim Ulama
4	YELIANTI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	ARIA PRIMADI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda
II.	SUNGAI SARIK		
1	KOMARUDIN	Ketua	Alim Ulama
2	SUNARTO	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3	SARTI RAHAYUNDA, P	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	RAHMAD NURBADI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Cadiak Pandai
5	UNTUNG SUSANTO	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda
III.	SUNGAI PULAI		
1	SAIRIN	Ketua	Cadiak Pandai
2	M, THOHARI	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	H. JUSRI	Sekretaris	Ninik Mamak
4	NUR HAMIDAH	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	SUNARKO	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda

	(2)	(3)	(4)
IV. PASIR BINJAI			
1	H. LANTIP WIBOWO	Ketua	Cadiak Pandai
2	YUDI TRI IRAWAN	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	ROSI LISTIAWATI, S.Pd	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	ABDI KUSUMA, LG	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Pemuda
5	BUSRIZAL, S.Ag	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Ninik Mamak
V. TALANG BINJAI			
1	M. MUKHLISIN	Ketua	Alim Ulama
2	ABDUL ROHMAN	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	PRIYONO	Sekretaris	Ninik Mamak
4	SITI NURKAYATIN	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5	PURNOMO	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda
VI. DURIAN SERIBU			
1	SUYADI	Ketua	Cadiak Pandai
2	ALI MA'RUF	Wakil Ketua	Alim Ulama
3	KUNDIYAH	Sekretaris	Bundo Kanduang
4	JAFRISON	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Ninik Mamak
5	ANDI LISTYAWAN	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda

	(2)	(3)	(4)
VII. LUBUK BUNTA			
1	SUGIYONO	Ketua	Cadiak Pandai
2	TASRIL	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3	HENDRI NOFRIADI	Sekretaris	Pemuda
4	MATHORI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Alim Ulama
5	NURJANI YATI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Bundo Kanduang
VIII. AIR HITAM			
1	UDIN SYAMSUDIN	Ketua	Ninik Mamak
2	SRIYONO	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	ABDUL HANIF	Sekretaris	Alim Ulama
4	OKI WAHYU Rianto	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Pemuda
5	SALMA WITRIANI, S.Pd	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Bundo Kanduang
IX. SAMBUNGO			
1	DALIYO	Ketua	Alim Ulama
2	GANI	Wakil Ketua	Cadiak Pandai
3	DEDI MARWANDI	Sekretaris	Ninik Mamak
4	TRIYANTO / TRIYATNO	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Pemuda
5	ERMITA / ERMANITA	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Bundo Kanduang

BUPAT PESIR SELATAN,

 HENDRAJONI